

Kolaborasi Civil-Maritime untuk Kedaulatan Laut dan Kesejahteraan Pesisir: Sinergi Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pendekatan Keamanan Maritim Terpadu

Jembar Heru Prabowo^{1*}, Adelya Mayangsari^{1*}, Ivanhoe^{1*},
Lukman Yudho Prakoso²

^{1,2}Universitas Pertahanan RI RI, Indonesia, Kampus Salemba, Jl. Salemba Raya No. 14, Kenari,
Kecamatan Senen. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10440

jembar.prabowo@km.idu.ac.id^{1*}, adelya.mayangsari@km.idu.ac.id^{1*},
ivanhoe@km.idu.ac.id^{1*}, lukman.prakoso@idu.ac.id²

Article Info	Abstrak
Article history: Received : Revised : Accepted :	Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini menuntut pendekatan keamanan maritim yang tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup keselamatan pelayaran, keamanan perdagangan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kolaboratif Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kedaulatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan keamanan maritim terpadu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur, analisis dokumen, dan observasi lapangan yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Tanjung Emas berperan dalam menjamin keselamatan pelayaran melalui penyelenggaraan kenavigasian, Bea Cukai berkontribusi dalam menjaga keamanan ekonomi maritim melalui pengawasan lalu lintas barang dan pencegahan kegiatan ilegal, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Sinergi ketiga institusi tersebut mencerminkan implementasi konsep <i>maritime governance</i> dan <i>integrated maritime security</i> yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi <i>civil-maritime</i> yang terintegrasi mampu memperkuat kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan untuk mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci: Keamanan Maritim; Kedaulatan Laut; Kolaborasi Civil Maritime; Kesejahteraan Pesisir; Maritime Governance.	

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis strategis di antara dua samudra dan dua benua. Kondisi tersebut menjadikan wilayah laut Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai jalur perdagangan internasional, sumber daya ekonomi, serta arena interaksi berbagai kepentingan nasional dan global. Dengan luas wilayah perairan yang mencapai lebih dari dua pertiga total wilayah negara, laut memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya menjaga keamanan maritim menjadi salah satu aspek

fundamental dalam mewujudkan kedaulatan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Till, 2018).

Perkembangan lingkungan strategis maritim saat ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan laut semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman tersebut tidak lagi terbatas pada pelanggaran kedaulatan wilayah, tetapi juga mencakup penyelundupan barang, perdagangan ilegal, kejahatan lintas negara, pencurian sumber daya kelautan, pencemaran lingkungan laut, hingga gangguan terhadap keselamatan pelayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim modern tidak dapat dipahami hanya dalam perspektif militer semata, melainkan harus dipandang sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan ruang maritim (Klein, 2011).

Dalam konteks tersebut, konsep *maritime security* mengalami perkembangan yang signifikan. Keamanan maritim tidak hanya berorientasi pada perlindungan wilayah laut dari ancaman keamanan tradisional, tetapi juga mencakup aspek keselamatan pelayaran (*maritime safety*), keamanan ekonomi (*economic security*), perlindungan sumber daya kelautan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maritime governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam pengelolaan ruang maritim secara terpadu dan berkelanjutan (Bueger, 2015).

Pentingnya kolaborasi lintas sektor menjadi semakin relevan mengingat setiap institusi maritim memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan. Dalam praktiknya, efektivitas keamanan maritim sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor untuk bekerja secara sinergis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pendekatan ini dikenal sebagai *whole-of-government approach*, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan berbagai lembaga pemerintah dalam menghadapi persoalan yang bersifat kompleks dan lintas sektor (Christensen & Laegreid, 2007).

Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah pesisir Kota Semarang, merupakan salah satu kawasan strategis yang memperlihatkan pentingnya kolaborasi tersebut. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai salah satu simpul utama aktivitas pelayaran, perdagangan, dan distribusi logistik di Pantai Utara Jawa menjadikan kawasan ini memiliki nilai strategis baik dari perspektif ekonomi maupun keamanan. Aktivitas maritim yang tinggi membutuhkan dukungan sistem keselamatan pelayaran yang andal, pengawasan lalu lintas barang yang efektif, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi maritim dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang saling melengkapi. Distrik Navigasi Tanjung Emas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kenavigasian guna menjamin keselamatan pelayaran melalui pengelolaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), *Vessel Traffic Services* (VTS), serta layanan informasi pelayaran. Fungsi tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan keamanan dan kelancaran lalu lintas kapal di wilayah perairan yang padat aktivitas.

Di sisi lain, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan ekonomi maritim melalui pengawasan arus barang, pencegahan penyelundupan, serta pengamanan rantai logistik nasional. Fungsi pengawasan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga mendukung terciptanya stabilitas perdagangan dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi yang sah. Dalam era digitalisasi, berbagai inovasi sistem informasi dan pengawasan yang dikembangkan

Bea Cukai menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola maritim yang lebih efektif dan transparan.

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbagai program pemberdayaan nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, konservasi ekosistem pesisir, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya laut merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Peran tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dalam kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI Republik Indonesia, terlihat bahwa ketiga institusi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun sistem keamanan maritim yang terpadu. Keselamatan pelayaran yang dijalankan Distrik Navigasi mendukung kelancaran distribusi logistik dan perdagangan. Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai menjaga keamanan aktivitas ekonomi maritim. Sementara pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi pesisir dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekonomi dan sosial yang berkembang di wilayah pesisir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung kedaulatan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan keamanan maritim terpadu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep *integrated maritime security* sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan sinergi kelembagaan maritim di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kolaborasi antarinstansi sipil maritim dalam mendukung kedaulatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan keamanan maritim terpadu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran, fungsi, dan hubungan antarlembaga maritim dalam konteks tata kelola keamanan maritim, bukan pada pengukuran hubungan statistik antarvariabel (Creswell, 2014).

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk sinergi, kontribusi, serta implikasi kolaborasi ketiga institusi tersebut terhadap keamanan maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan komprehensif terkait peran serta sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi keamanan maritim terpadu.

Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui paparan, diskusi, dan observasi langsung pada sejumlah instansi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola maritim, yaitu Distrik Navigasi Tanjung Emas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data primer ini digunakan untuk memahami kondisi aktual, tantangan, dan bentuk kolaborasi yang telah dikembangkan oleh masing-masing institusi dalam mendukung keamanan maritim, keselamatan pelayaran, pengawasan aktivitas ekonomi maritim, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi instansi pemerintah yang berkaitan dengan keamanan maritim, tata kelola maritim, dan pembangunan wilayah pesisir. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis temuan lapangan serta menjelaskan hubungan antara konsep keamanan maritim, kolaborasi kelembagaan, kedaulatan laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai keamanan maritim, tata kelola maritim, kolaborasi kelembagaan, dan pembangunan wilayah pesisir melalui penelaahan buku, artikel ilmiah, regulasi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Observasi lapangan dilakukan selama kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI guna memperoleh pemahaman empiris mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penelitian juga memanfaatkan analisis dokumen terhadap materi paparan, laporan kegiatan, data kelembagaan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh selama kegiatan KKDN. Melalui kombinasi ketiga teknik tersebut, penelitian memperoleh data yang komprehensif untuk menganalisis bentuk kolaborasi antarinstansi dalam mendukung keamanan maritim terpadu dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang menghubungkan kolaborasi *civil-maritime*, keamanan maritim, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kolaborasi antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dianalisis untuk melihat kontribusinya dalam mewujudkan keamanan maritim melalui keselamatan pelayaran, pengawasan wilayah perairan, keamanan perdagangan laut, dan perlindungan sumber daya kelautan. Keamanan maritim yang tercipta diharapkan mampu memperkuat kedaulatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui aktivitas ekonomi, perikanan, distribusi logistik, dan pembangunan wilayah pesisir. Hubungan antar komponen tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian
(Sumber : Diolah penulis,2026)

Validitas Data

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, dokumen instansi, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi, tetapi merupakan hasil sintesis dari berbagai data yang saling mendukung (Moleong, 2017).

Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kolaborasi *civil-maritime* dalam mendukung keamanan maritim terpadu, sekaligus menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Civil-Maritime dalam Perspektif Keamanan Maritim Terpadu

Perkembangan konsep keamanan maritim modern menunjukkan bahwa keamanan laut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman militer, melainkan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, keamanan ekonomi, perlindungan sumber daya kelautan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam perspektif ini, keamanan maritim menjadi suatu sistem yang melibatkan berbagai institusi dengan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola maritim yang efektif dan berkelanjutan (Bueger, 2015).

Hasil observasi lapangan yang dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang berbeda, namun secara substansial berada dalam satu ekosistem keamanan maritim yang saling terhubung. Sinergi tersebut mencerminkan penerapan pendekatan *whole-of-government* dalam pengelolaan sektor maritim, di mana keberhasilan satu institusi akan mendukung efektivitas institusi lainnya dalam mencapai tujuan bersama, yaitu terjaganya kedaulatan laut dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Distrik Navigasi Tanjung Emas sebagai Fondasi Keselamatan Pelayaran

Salah satu temuan penting dari kegiatan KKDN adalah peran strategis Distrik Navigasi Tanjung Emas dalam menjamin keselamatan pelayaran melalui

penyelenggaraan kenavigasian. Fungsi ini meliputi pengelolaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pelayanan *Vessel Traffic Services* (VTS), pemeliharaan alur pelayaran, serta penyediaan informasi keselamatan navigasi bagi kapal yang beroperasi di wilayah perairan.

Dalam perspektif keamanan maritim, keselamatan pelayaran (*maritime safety*) merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keamanan laut (*maritime security*). Kapal yang berlayar dengan aman akan mengurangi risiko kecelakaan, gangguan distribusi logistik, maupun ancaman terhadap lingkungan laut. Dengan demikian, peran Distrik Navigasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayaran, tetapi juga mendukung stabilitas aktivitas ekonomi maritim secara keseluruhan (Klein, 2011).

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai salah satu pelabuhan utama di Pantai Utara Jawa menjadikan fungsi kenavigasian semakin penting. Tingginya intensitas lalu lintas kapal membutuhkan sistem navigasi yang akurat dan andal agar aktivitas perdagangan, distribusi barang, serta kegiatan perikanan dapat berjalan secara aman dan efisien. Dalam konteks ini, Distrik Navigasi berperan sebagai institusi yang menciptakan ruang laut yang aman untuk dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Lebih jauh, keselamatan pelayaran juga memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Jalur pelayaran yang aman akan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil perikanan, serta mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan dan pesisir. Dengan demikian, kontribusi Distrik Navigasi tidak hanya dirasakan oleh pengguna jasa pelayaran, tetapi juga oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor maritim.

Peran Bea Cukai dalam Menjaga Keamanan Ekonomi Maritim

Selain aspek keselamatan pelayaran, keamanan maritim juga berkaitan erat dengan keamanan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah laut dan pelabuhan. Berdasarkan hasil paparan yang diperoleh selama KKDN, Bea Cukai memiliki fungsi strategis dalam melakukan pengawasan terhadap arus barang, pencegahan penyelundupan, serta perlindungan terhadap aktivitas perdagangan yang sah.

Dalam teori keamanan maritim modern, aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, perdagangan narkoba, dan kejahatan lintas negara merupakan ancaman non-tradisional yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional (Till, 2018). Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Bea Cukai memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas rantai logistik nasional dan menciptakan iklim perdagangan yang aman.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Bea Cukai telah memanfaatkan berbagai sistem digital untuk mendukung pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Transformasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat kemampuan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan internasional yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepabeanan menunjukkan bahwa keamanan maritim modern sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola informasi secara cepat dan akurat.

Keamanan ekonomi yang tercipta melalui pengawasan Bea Cukai memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan wilayah pesisir. Aktivitas perdagangan yang berjalan lancar akan meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, fungsi Bea Cukai tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi maritim.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Kesejahteraan Pesisir

Berbeda dengan Distrik Navigasi dan Bea Cukai yang berfokus pada aspek keselamatan dan pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki orientasi yang lebih kuat pada pengelolaan sumber daya kelautan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil paparan yang diperoleh selama KKDN, Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, konservasi ekosistem pesisir, rehabilitasi mangrove, serta pengawasan pemanfaatan sumber daya laut. Program-program tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. (DKP Jawa Tengah, 2026)

Dalam perspektif *human security*, keamanan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup jaminan terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya kelautan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan ekonomi daerah (United Nations Development Programme, 1994).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem laut sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *blue economy* yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara produktif sekaligus berkelanjutan (Pauli, 2010).

Dengan demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan berperan sebagai aktor yang menghubungkan keamanan maritim dengan kesejahteraan masyarakat. Keamanan laut yang terjaga akan menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas perikanan, sementara pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan akan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun mendatang.

Sinergi Antarinstansi sebagai Model Keamanan Maritim Terpadu

Hasil analisis menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung keamanan maritim terpadu. Sinergi antarinstansi tersebut membentuk suatu sistem tata kelola maritim yang tidak hanya berorientasi pada keselamatan dan keamanan laut, tetapi juga pada penguatan kedaulatan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hubungan antar komponen tersebut dapat digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Konsep kolaborasi antara Distrik Navigasi, Bea Cukai dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Keamanan Maritim Terpadu

(Sumber: Diolah oleh penulis dan diilustrasikan oleh AI (2026))

Model tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak berdiri sendiri sebagai tujuan akhir, melainkan menjadi instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Distrik Navigasi dalam menjamin keselamatan pelayaran akan mendukung kelancaran perdagangan yang diawasi oleh Bea Cukai. Selanjutnya, stabilitas aktivitas ekonomi maritim akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi *civil-maritime* merupakan salah satu bentuk implementasi *integrated maritime security* yang relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai institusi untuk bekerja secara sinergis dalam menghadapi tantangan maritim yang semakin kompleks dan multidimensional.

Peran Bea Cukai dalam Menjaga Keamanan Ekonomi Maritim

Selain aspek keselamatan pelayaran, keamanan maritim juga berkaitan erat dengan keamanan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah laut dan pelabuhan. Berdasarkan hasil paparan yang diperoleh selama kegiatan KKDN, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang, pencegahan penyelundupan, serta perlindungan terhadap aktivitas perdagangan yang sah di wilayah maritim (Bea Cukai Tanjung Emas, 2026). Fungsi tersebut tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap keamanan ekonomi maritim melalui pengawasan rantai logistik dan pencegahan berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan yang berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan dan aktivitas ekonomi nasional (Bea Cukai Tanjung Emas, 2026).

Dalam teori keamanan maritim modern, aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, perdagangan narkoba, dan kejahatan lintas negara merupakan ancaman non-

tradisional yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional (Till, 2018). Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Bea Cukai memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas rantai logistik nasional dan menciptakan iklim perdagangan yang aman.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Bea Cukai telah memanfaatkan berbagai sistem digital untuk mendukung pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Transformasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat kemampuan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan internasional yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepabeanan menunjukkan bahwa keamanan maritim modern sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola informasi secara cepat dan akurat.

Keamanan ekonomi yang tercipta melalui pengawasan Bea Cukai memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan wilayah pesisir. Aktivitas perdagangan yang berjalan lancar akan meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, fungsi Bea Cukai tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi maritim.

Tantangan Implementasi Kolaborasi Civil-Maritime dan Implikasi Strategis terhadap Kedaulatan Laut dan Kesejahteraan Pesisir

Meskipun kolaborasi antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung keamanan maritim terpadu, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi koordinasi lintas sektor, integrasi sistem informasi, sinkronisasi kebijakan, serta perbedaan prioritas dan ruang lingkup kewenangan masing-masing institusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan keamanan maritim tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu lembaga, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme kolaborasi yang dibangun di antara para pemangku kepentingan.

Dalam perspektif keamanan maritim modern, ancaman yang dihadapi bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari keselamatan pelayaran, penyelundupan barang, pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut, hingga degradasi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai institusi secara simultan. Bueger (2015) menjelaskan bahwa keamanan maritim merupakan konsep yang mencakup berbagai dimensi keamanan sehingga membutuhkan koordinasi antarlembaga yang efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Christensen dan Laegreid (2007) menekankan pentingnya pendekatan *whole-of-government* dalam menghadapi permasalahan publik yang kompleks dan lintas sektor.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kolaborasi *civil-maritime* terletak pada optimalisasi pertukaran informasi dan koordinasi operasional antarinstansi. Meskipun masing-masing institusi telah menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, integrasi data dan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, respons terhadap ancaman, serta pengambilan keputusan secara terpadu. Penguatan interoperabilitas sistem informasi dan forum koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola maritim yang lebih adaptif dan responsif.

Dari perspektif strategis, keberhasilan kolaborasi *civil-maritime* akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan kedaulatan laut Indonesia. Sistem keamanan maritim yang terintegrasi mampu meningkatkan keselamatan pelayaran,

memperkuat pengawasan aktivitas maritim, mencegah berbagai kegiatan ilegal, serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan. Pada saat yang sama, kondisi keamanan yang stabil akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi maritim, peningkatan produktivitas sektor perikanan, kelancaran distribusi logistik, dan pembangunan wilayah pesisir.

Dengan demikian, penguatan kolaborasi antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menjadi kebutuhan operasional dalam mendukung keamanan maritim, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Tantangan Integrasi Antarinstansi

Salah satu tantangan yang sering muncul dalam tata kelola maritim adalah adanya perbedaan fokus, kewenangan, dan sistem kerja antarinstansi. Distrik Navigasi berorientasi pada keselamatan pelayaran, Bea Cukai berfokus pada pengawasan lalu lintas barang dan keamanan ekonomi, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan apabila tidak didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif.

Hasil observasi selama kegiatan KKDN menunjukkan bahwa masing-masing institusi telah memiliki sistem dan program kerja yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, tantangan yang masih perlu diperkuat adalah bagaimana membangun integrasi informasi dan koordinasi yang berkelanjutan sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung tujuan bersama dalam menjaga keamanan maritim dan mendorong pembangunan wilayah pesisir.

Dalam perspektif *whole-of-government approach*, integrasi kelembagaan menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya negara (Christensen & Laegreid, 2007). Oleh karena itu, penguatan forum koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kebutuhan strategis dalam mendukung tata kelola maritim yang lebih efektif.

Tantangan Transformasi Digital dan Pertukaran Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara institusi maritim menjalankan fungsi pengawasan, pelayanan, dan pengambilan keputusan. Bea Cukai misalnya telah mengembangkan berbagai sistem digital untuk mendukung pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Di sisi lain, Distrik Navigasi memanfaatkan teknologi kenavigasian dan sistem pemantauan lalu lintas kapal, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan juga mulai mengembangkan sistem informasi terkait pengelolaan sumber daya kelautan.

Namun demikian, keberadaan berbagai sistem tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem informasi maritim yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Padahal, dalam konsep *Maritime Domain Awareness* (MDA), kemampuan mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi secara cepat merupakan elemen penting dalam mendukung keamanan maritim (Klein, 2011).

Keterbatasan integrasi data dapat menghambat proses identifikasi risiko, pengambilan keputusan, dan respons terhadap berbagai ancaman di wilayah maritim. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang terhubung antarinstansi menjadi salah satu langkah yang perlu diprioritaskan dalam memperkuat keamanan maritim terpadu.

Tantangan Dinamika Lingkungan Maritim

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi berbagai tantangan maritim yang terus berkembang, mulai dari penyelundupan, pencurian sumber daya laut, pelanggaran wilayah perairan, hingga dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir. Tantangan tersebut memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan aspek keamanan, ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersamaan.

Di wilayah pesisir Jawa Tengah, aktivitas pelayaran yang tinggi, keberadaan pelabuhan strategis, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut menjadikan kawasan ini memerlukan sistem pengelolaan yang adaptif. Dalam situasi seperti ini, pendekatan sektoral tidak lagi memadai. Sebaliknya, diperlukan model kolaborasi yang mampu menghubungkan keselamatan pelayaran, pengawasan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya kelautan dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya bagaimana menjaga keamanan laut, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa keamanan tersebut mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Implikasi Strategis terhadap Kedaulatan Laut

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki implikasi strategis yang signifikan terhadap penguatan kedaulatan laut Indonesia.

Pertama, sinergi tersebut memperkuat kehadiran negara di wilayah maritim melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Kehadiran negara yang efektif merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kedaulatan dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan nasional (Till, 2018).

Kedua, kolaborasi antarinstansi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas maritim yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Integrasi fungsi keselamatan pelayaran, pengawasan perdagangan, dan pengelolaan sumber daya laut menciptakan sistem keamanan yang lebih komprehensif dibandingkan apabila masing-masing institusi bekerja secara terpisah.

Ketiga, sinergi tersebut mendukung implementasi visi Indonesia sebagai negara maritim yang mampu mengelola ruang lautnya secara aman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keamanan maritim tidak hanya dipahami sebagai perlindungan wilayah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional.

Implikasi Strategis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa keamanan maritim yang efektif memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hubungan tersebut terlihat melalui berbagai mekanisme yang saling berkaitan. Keselamatan pelayaran yang terjamin akan mendukung kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi maritim. Keamanan perdagangan yang dijaga oleh Bea Cukai akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. Sementara itu, pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan akan memastikan bahwa masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keamanan maritim tidak hanya menghasilkan stabilitas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal. Kondisi ini sejalan dengan konsep *human security* yang menempatkan

kesejahteraan manusia sebagai salah satu tujuan utama dari kebijakan keamanan (United Nations Development Programme, 1994).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi *civil-maritime* merupakan elemen penting dalam mewujudkan keamanan maritim terpadu yang berimplikasi pada penguatan kedaulatan laut, keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan sektoral yang berfokus pada satu institusi atau satu dimensi keamanan tertentu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan pendekatan keamanan maritim yang terpadu, yang mampu mengintegrasikan aspek keselamatan pelayaran, keamanan ekonomi maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi contoh implementasi sinergi *civil-maritime* yang mendukung terwujudnya tata kelola maritim yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Tanjung Emas memiliki peran fundamental dalam menjamin keselamatan pelayaran melalui penyelenggaraan kenavigasian, pengelolaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta pelayanan informasi keselamatan pelayaran. Peran tersebut menjadi fondasi utama bagi terciptanya aktivitas maritim yang aman dan mendukung kelancaran distribusi logistik nasional.

Di sisi lain, Bea Cukai berperan dalam menjaga keamanan ekonomi maritim melalui pengawasan arus barang, pencegahan penyelundupan, serta pengamanan rantai logistik nasional. Fungsi ini tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga menciptakan stabilitas perdagangan dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap sistem transportasi laut Indonesia.

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui program pemberdayaan nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, konservasi ekosistem pesisir, dan peningkatan produktivitas sektor kelautan. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber daya laut.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga institusi tersebut membentuk suatu rantai tata kelola maritim yang saling mendukung. Keselamatan pelayaran yang terjamin akan mendukung kelancaran perdagangan dan distribusi barang. Stabilitas perdagangan akan memperkuat aktivitas ekonomi maritim. Selanjutnya, kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, keamanan maritim tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan negara, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi *civil-maritime* yang terintegrasi mampu memperkuat kedaulatan laut sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Semakin efektif sinergi antarinstansi maritim, semakin besar pula peluang terciptanya keamanan maritim yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap pembangunan wilayah pesisir.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kolaborasi *civil-maritime* dalam mendukung keamanan maritim terpadu dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1. Penguatan Mekanisme Koordinasi Antarinstansi Maritim

Pemerintah perlu memperkuat forum koordinasi yang melibatkan Distrik Navigasi, Bea Cukai, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi maritim lainnya secara berkelanjutan. Forum tersebut dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi, sinkronisasi kebijakan, dan penyelesaian permasalahan lintas sektor yang muncul di wilayah maritim.

2. Integrasi Sistem Informasi Maritim

Perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem informasi maritim yang terintegrasi. Integrasi data kenavigasian, pengawasan kepabeanan, dan pengelolaan sumber daya kelautan akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman maritim.

3. Penguatan Maritime Domain Awareness (MDA)

Peningkatan kesadaran domain maritim (*Maritime Domain Awareness*) perlu menjadi prioritas dalam mendukung keamanan maritim nasional. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pemantauan wilayah laut, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola informasi maritim secara terpadu.

4. Peningkatan Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Program pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi maritim. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari keamanan maritim dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, akses pasar, pengembangan usaha perikanan, dan penciptaan lapangan kerja.

5. Penguatan Pendekatan Keamanan Maritim Berbasis Kesejahteraan

Kebijakan keamanan maritim hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep human security yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kebijakan keamanan dan pembangunan.

6. Pengembangan Model Kolaborasi Civil-Maritime sebagai Best Practice Nasional

Model sinergi yang terbangun antara Distrik Navigasi Tanjung Emas, Bea Cukai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai salah satu contoh praktik baik (*best practice*) dalam tata kelola maritim daerah. Model tersebut berpotensi direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik maritim serupa guna mendukung implementasi keamanan maritim terpadu di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bueger, C. (2015). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Christensen, T., & Laegreid, P. (2007). The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Distrik Navigasi Tanjung Emas. (2026). Paparan profil dan tugas Distrik Navigasi Tanjung Emas. Disampaikan pada kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI, Semarang.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (2026). Paparan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan pada kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI, Semarang.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (2026). Paparan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di wilayah kerja Jawa Tengah. Disampaikan pada kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI, Semarang.
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2026). Paparan pembangunan daerah dan pengelolaan sektor maritim Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan pada kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI, Semarang.
- Till, G. (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* (4th ed.). Routledge.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. Oxford University Press.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.